

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak dahulu telah ada orang-orang yang memberikan perhatian kepada nasib wanita, yang dianggap diperlakukan tidak adil dalam masyarakat maupun dalam keluarga dibanding pria. Wanita di mana-mana mencurahkan tenaganya untuk melestarikan keluarganya, mendidik anak-anaknya, merawat anggota-anggota keluarga yang sakit, bahkan di luar rumah tangga wanita memegang peranan dalam usaha kesejahteraan masyarakat. Tetapi di manapun masih dirasakan adanya ketimpangan dalam pengakuan dan penghargaan terhadap wanita dibanding pria.

Emansipasi dan tuntutan keadilan yang diinginkan wanita dalam kehidupan bermasyarakat, memintakan perhatian pada semua pihak, terutama pria. Kenyataan ini timbul sebagai akibat adanya anggapan dari masyarakat bahwa wanita menduduki tempat kedua dalam masyarakat dan dalam kehidupan keluarga pun wanita lebih rendah dari pada pria. Peranan wanita sebagai kepala urusan rumah tangga keluarga dan peran pria sebagai kepala keluarga menempatkan wanita pada posisi kaum yang harus mengutamakan keluarganya. Maksudnya wanita boleh berkarir asal tetap mengutamakan keluarga.

Peranan wanita dalam kehidupan mungkin berbeda dengan kehidupan bermasyarakat atau dalam konteks ibadah menurut keyakinan agama masing-masing. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia menganggap peranan wanita lebih rendah dari pada pria, bahkan pada masyarakat Jawa pada umumnya menganggap peranan wanita hanya pada sektor rumah tangga saja seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami. Demikian pula pada masyarakat Lampung, dalam satu keluarga akan terasa lebih lengkap jika telah mempunyai anak pria yang diharapkan dapat menjadi pemimpin yang akan meneruskan garis keturunan keluarga dimasa yang akan datang. Dalam kehidupan agama pun dikatakan bahwa peranan wanita menempati posisi kedua, karena wanita dianggap kurang tepat menjadi seorang pemimpin seperti dalam beribadah, wanita disini hanya dapat menjadi imam bagi wanita tidak untuk pria, demikian juga dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

Hambatan budaya yang beranggapan bahwa pendidikan lebih diutamakan bagi anak laki-laki dari pada anak perempuan terutama di masyarakat pedesaan, kawin diusia muda dan membentuk keluarga bagi anak perempuan, bahkan bercerai dan dimadu dianggap hal wajar bagi kalangan etnis tertentu. Wanita dipersepsikan bekerja disektor domestik (rumah tangga) dan pria bekerja disektor publik (produktif) yang masih kuat dalam budaya masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap peranan wanita.

Secara hukum dalam hubungannya dengan peranan wanita, kaum wanita dan kaum pria di Indonesia mempunyai kedudukan dan hak yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28D ayat (1) setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan ayat (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Persamaan hak menurut Victor Situmorang (1988:88) adalah: “Kesempatan yang sama yang diberikan kepada pria maupun wanita untuk menjalankan hak dan kewajibannya”. Artinya wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan imbalan yang sesuai dengan jasa yang diberikannya, untuk menuntut ilmu, mendapatkan perlindungan di muka hukum, agama, ekonomi serta dalam bidang politik.

Wanita juga mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Hardjito Notopuro (1984:26) bahwa: “seluruh rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses pembangunan baik pria maupun wanita”. Keikutsertaan wanita dalam pelaksanaan pembangunan sekarang ini dirasakan semakin penting, mengingat sebagian rakyat Indonesia terdiri dari kaum wanita yang merupakan tenaga potensial, seperti sebagai anggota perwakilan rakyat, pegawai pemerintah, swasta, guru dan sebagai ibu rumah tangga.

Hal ini menunjukkan wanita selain bertanggung jawab atas urusan rumah tangga juga diharapkan untuk melakukan aktifitas diluar rumah tangga sebagai anggota masyarakat terutama dalam proses pembangunan.

Ditingkat nasional kepemimpinan wanita Indonesia ternyata mendapat tempat misalnya Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno putri. Dalam

upaya peningkatan kedudukan dan peranan perempuan, maka dalam Kabinet Pembangunan 111, dibentuk Menteri Muda Urusan Peranan Wanita yang kemudian berubah menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan sekarang disebut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang pada saat itu dijabat oleh ibu Lusia Sutanto, S.H.

Desa Hanakau Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungkai Utara yang berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara. Semenjak tahun 2008 hingga sekarang Desa Hanakau Jaya dipimpin oleh seorang kepala desa wanita, yaitu Ibu Yoheni Adenin. Wanita kelahiran kota bumi 05 Mei 1964 yang bersuamikan Zainal Abidin Gajah ini dipilih berdasarkan hasil pemilihan kepala desa.

Berdasarkan data hasil observasi diketahui bahwa Desa Hanakau Jaya memiliki jumlah masyarakat yang cukup banyak jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Sungkai Utara. Secara rinci jumlah masyarakat di Desa Hanakau Jaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Jumlah Masyarakat di Desa Hanakau Jaya Tahun 2010

No.	Dusun	Jumlah Masyarakat		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	108	113	221
2	Dusun II	126	96	222
3	Dusun III	259	220	479
4	Dusun IV	97	99	196
5	Dusun V	126	107	233
6	Dusun VI	100	78	178
<b>Jumlah</b>		816	713	1529

Sumber : Dokumentasi Bagian Kependudukan Desa Hanakau Jaya

Berdasarkan tabel 1, dapat dijabarkan bahwa jumlah masyarakat di Desa Hanakau Jaya berjumlah 1529 orang yang tersebar dalam 6 dusun. Masyarakat di Dusun I berjumlah 221 orang, Dusun II berjumlah 222 orang, Dusun III berjumlah 479 orang, Dusun IV berjumlah 196, Dusun V berjumlah 233 dan Dusun VI yang berjumlah 178 orang, sehingga jumlah semuanya adalah 1529 orang. Dusun III sebagai dusun dengan jumlah masyarakat terbanyak, Sedangkan dusun yang terendah jumlah masyarakatnya adalah dusun VI.

Masyarakat di Desa Hanakau Jaya berada dalam masyarakat yang disebut sebagai masyarakat transisi. Masyarakat transisi adalah masyarakat yang sedang mencoba untuk membebaskan diri dari nilai-nilai masa lalu dan menggapai masa depan dengan terus-menerus membuat nilai-nilai baru atau hal-hal baru.

Masyarakat transisi merupakan gambaran keadaan masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai sosial budaya asli berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebiasaan, keadaan struktur masyarakat, cara-cara berinteraksi dan lain sebagainya, akan tetapi pegangan masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada semakin lama semakin melemah.

Oleh sebab itu sikap masyarakat terhadap kepemimpinan wanita dalam pemerintahan desa masih kurang dianggap. Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa wanita yang menjadi kepala desa kurang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya apabila dibandingkan dengan kepala desa pria. Hal ini karena wanita dianggap masih dipengaruhi oleh pria. Kecenderungan ini yang menyebabkan jumlah wanita

yang memegang jabatan sebagai pemimpin (kepala desa) sangat sedikit, seperti yang terjadi di Kecamatan Sungkai Utara, dari 15 desa hanya terdapat satu kepala desa wanita yaitu di Desa Hanakau Jaya.

Keadaan ini tentunya tidak terlepas dari sikap masyarakat dalam menanggapi dan menilai seorang wanita sebagai kepala desa dan kepemimpinannya, baik sikap masyarakat yang menerima atau menolak. Oleh karena itu permasalahan ini perlu diteliti untuk mendapat jawaban yang jelas tentang sikap masyarakat terhadap kemampuan kepala desa wanita dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Hubungannya dengan kepemimpinan ini, Hadari Nawawi dan M.Martini Hadari (2000:9) mengemukakan bahwa:

“Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama”.

Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kelebihan sebagai predisposisi atau bakat yang dibawa sejak lahir, dan merupakan kebutuhan dari satu situasi sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahannya. Pemimpin harus pula mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya kearah tujuan tersebut.

Adanya pernyataan bahwa wanita mendapat tempat yang sama dalam kepemimpinan pemerintahan merupakan pengakuan sekaligus kepercayaan masyarakat, namun tidak selamanya pada kurun waktu dan tempat yang sama

dan berbeda akan terjadi demikian. Dengan perkataan lain, tidak dalam segala situasi kepemimpinan wanita dapat diterima.

Merupakan suatu kenyataan bahwa keadaan diatas menimbulkan sikap menerima atau menolak. Sikap menerima atau menolak ini akan menciptakan masalah tersendiri bagi wanita yang mempunyai kedudukan diluar struktur keluarga yang dikaitkan dengan kepemimpinannya. Beberapa penyebab adanya sikap menolak, diantaranya karena sikap suami , sistem sosial, atau struktur sosial, tradisi (budaya) dan kodrat.

Pada hakikatnya, sikap masyarakat ini diarahkan untuk menanggapi kepemimpinan wanita dalam pemerintahan karena maju mundurnya suatu desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa. Dengan kepemimpinan kepala desa yang baik dan sesuai dengan fungsi-fungsinya maka desa tersebut dapat melaksanakan pembangunan dengan baik sehingga dapat lebih cepat berkembang. Demikian pula sebaliknya, apabila kepemimpinan kepala desa tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak sesuai dengan fungsi-fungsinya, maka desa tersebut akan sulit berkembang.

Keberhasilan kepemimpinan wanita dalam pemerintahan desa sangat berpengaruh terhadap sikap masyarakat dalam menanggapi kepemimpinan itu sendiri. Sikap masyarakat terhadap kepemimpinan wanita dalam pemerintahan desa adalah respon/tanggapan yang diberikan masyarakat yang berupa penilaian negatif (menolak) atau positif (menerima) terhadap kemampuan seorang wanita sebagai kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut dengan suatu penelitian yang berjudul : *"Sikap Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Wanita Dalam Pembangunan di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara"*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sikap masyarakat terhadap kepemimpinan wanita dalam pemerintahan desa.
2. Respon atau tanggapan yang diberikan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa.
3. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pemimpin wanita.
4. Budaya masyarakat menerima atau tidak terhadap kepemimpinan wanita.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah agar permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi permasalahan hanya pada sikap masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa wanita dalam pembangunan di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah, permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap fungsi kepemimpinan Kepala Desa wanita di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap fungsi kepemimpinan Kepala Desa wanita di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya dan mengembangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, khususnya ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang mengkaji pendidikan politik dan kenegaraan, serta masalah sosial dan kemasyarakatan.

## b. Kegunaan Praktis

Secara praktis dari penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai:

1. Masukan untuk Kepala Desa wanita mengenai sikap masyarakat terhadap kepemimpinan wanita dalam pemerintahan desa.
2. Masukan untuk masyarakat bagaimana sebaiknya melihat kepemimpinan wanita dalam pemerintahan desa.
3. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan dan pemikiran dalam mengembangkan konsep atau teori yang berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kepemimpinan wanita dalam pemerintahan desa.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya khasanah ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat dan mahasiswa.

## F. Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Ilmu

Ilmu penelitian ini adalah ilmu pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan dalam bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan dengan kontribusinya untuk membentuk warga Negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dalam kebudayaan politik dan kenegaraan.

## **2. Ruang Lingkup Objek**

Objek Penelitian ini adalah sikap masyarakat terhadap fungsi kepemimpinan Kepala Desa wanita di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

## **3. Ruang Lingkup Subjek**

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

## **4. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

## **5. Ruang Lingkup Waktu**

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya Surat Izin Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sampai selesainya penelitian ini.